

**Transformasi Konflik Sosial Antar-Etnis Bali dan Lampung dalam
Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga Kecamatan Way Panji
Kabupaten Lampung Selatan**

**Transformation of Balinese and Lampung Inter-Ethnic Social Conflict in
Realizing Peace in Balinuraga, Way Panji District
South Lampung Regency**

Akbar Kurniadi¹, Tri Legionosuko², dan Wibisono Poespito Hadi³

email: akbarkurniadi66@gmail.com

Jurnal ini membahas tentang upaya transformasi pasca konflik sosial antar etnis Bali dan suku asli Lampung di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, Serta menganalisis berbagai faktor penyebab konflik laten di Balinuraga menjadi konflik terbuka dan bagaimana upaya transformasi pasca konflik dilakukan untuk mengubah kondisi yang konfliktual menjadi harmonis, destruktif menjadi konstruktif, sehingga terwujud perdamaian yang berkelanjutan di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), konflik Balinuraga masuk kedalam lima (5) wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk pasca reformasi. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji tentang bagaimana upaya transformasi konflik di Balinuraga, sehingga peneliti merasa perlu untuk mengangkat tema transformasi konflik Balinuraga sebagai judul dan pokok pembahasan dalam kajian ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis kasus, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep, seperti Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Kerja Sama, Teori Identitas Sosial, Konsep Segitiga ABC Konflik Galtung, Konsep SAT, dan Konsep Perdamaian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Balinuraga dipicu oleh kenakalan remaja, diperluas dengan isu etnisitas dan arogansi antar kelompok sebagai akselerator, dan dilatarbelakangi kebijakan transmigrasi serta isu kesenjangan ekonomi sebagai faktor struktural. Upaya transformasi konflik dilakukan dalam empat dimensi, yaitu personal dengan mengubah sikap dan perilaku, relasional dengan menjalin kembali hubungan kerja sama, kultural dengan penguatan budaya dan adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik, dan struktural melalui penguatan institusi pemerintah daerah Provinsi Lampung dan TNI/Polri, demi mewujudkan perdamaian dan keamanan nasional.

Kata Kunci: Konflik, Transformasi Konflik, Suku Bangsa, Budaya, dan Perdamaian.

This journal works through an issue related to the transformation efforts post social conflict between Balinese and indigenous Lampung tribes in Balinuraga, Way Panji District, South Lampung Regency. The aim of this study is to analyze the various factors that cause latent conflict in Balinuraga to be a manifest conflict, and how post-conflict transformation efforts are carried out to change conflictual conditions to be harmonious, destructive to constructive, so that sustainable peace can be realized in Balinuraga, Way Panji District, South Lampung Regency. Based on the survey results from the Indonesian Survey Circle (LSI), the Balinuraga conflict falls into five (5) regions with the worst levels of discrimination after reformation era. In addition, there has been no research that examines how conflict transformation efforts in Balinuraga, so researcher feels the need to raise the

¹ Mahasiswa Pascasarjana Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

² Rektor Universitas Pertahanan

³ Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pertahanan

theme of Balinuraga conflict transformation as the title and subject matter of this thesis. This research was conducted using qualitative methods by collecting data through interviews, observation and documentation. Whereas in the case analysis process, researchers used several theories and concepts, such as Conflict Theory, Conflict Transformation Theory, Cooperation Theory, Social Identity Theory, ABC Triangle Conflict Concept, SAT Concept, and Peace Concept. The results of the study show that the Balinuraga conflict was triggered by juvenile delinquency, extended by issues of ethnicity and arrogance between groups as accelerators, and was motivated by transmigration policies and the issue of economic inequality as structural factors. Conflict transformation efforts are carried out in four dimensions, namely personal by changing attitudes and behaviors, relational by re-establishing cooperative, cultural relations with cultural and customary reinforcement as a mechanism for conflict resolution, and structural through strengthening the institutions of local government in Lampung Province and TNI / Polri, for realize national peace and security.

Keywords: Conflict, Transformation of Conflict, Tribe, Culture, and Peace.

Pendahuluan

Provinsi Lampung sering disebut sebagai “Jawa Utara” karena letaknya yang berada di ujung selatan Pulau Jawa, dan secara geografis hanya dipisahkan oleh sebuah selat, yaitu Selat Sunda. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Lampung merupakan wilayah Karesidenan Provinsi Sumatera Selatan yang ibu kotanya adalah Palembang. Berdasarkan aspek legalitas hukum (*de Jure*) Provinsi Lampung⁴ didirikan pada 18 Maret 1964 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perppu) No 3 Tahun 1964 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1964.⁵

Secara administratif, sebelah Utara Provinsi Lampung berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Banten, dan sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia.⁶ Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Lampung pada 2014 adalah 8.026.191 jiwa.⁷ Dari hasil sensus tersebut, suku Jawa merupakan entitas

⁴ Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 51.991,8 km², dengan luas daratan 35.376,5 km² dan luas perairan pesisir sekitar 16.625,3 km². Panjang garis pantainya kurang lebih 1.105 km yang terdiri dari 69 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Tabuan. Selain itu, terdapat dua teluk besar di Lampung, yaitu Teluk Lampung dan Teluk Semangka. Dalam Merajut Jurnalisme Damai di Lampung, Aji Bandar Lampung (2012): 10-11.

⁵ Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN. Catatan Pembuka: Merajut Jurnalisme Damai di Lampung. Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012, hlm. 10.

⁶ *Ibid.*

⁷ Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten atau Kota, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin 2014; dari <https://lampung.bps.go.id/dynamicstable/2017/04/11/391/jumlah-penduduk-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-jenis-kelamin-dan-rasio-jenis-kelamin-2014.html>; diakses pada 4 Agustus 2018.

terbesar dengan persentase sebesar 61,02%, sedangkan suku Lampung hanya berkisar 11,9%, jumlah ini masih lebih kecil dari etnis Sunda 13,29%, dan sisanya adalah suku minoritas seperti Banten 3,68%, Palembang 2,89%, Bali 1,62%, serta etnis lainnya 3,48%.⁸ Fakta ini menunjukkan bahwa Lampung merupakan salah satu daerah dengan keragaman suku dan budaya yang tinggi.

Heterogenitas budaya, suku dan agama di Provinsi Lampung tersebut merupakan produk dari kebijakan transmigrasi yang dimulai dari masa kolonisasi (1905-1942),⁹ pra-Pelita (1950-1969), Pelita I-IV/Masa Orde Baru

⁸ Sudrajat, Djadjat. Catatan Penutup: Lampung, Merajut Jurnalisme Damai di Lampung. Bandar Lampung: Aji Bandar Lampung, 2012, hlm. 185.

⁹ Transmigrasi pada periode ini dilatarbelakangi oleh gagasan "Politik Balas Budi" Van Deventer, ditulis dalam bukunya, "Een Eere Schuld", yang bertujuan untuk mengurai rantai kemiskinan di Pulau Jawa akibat kerja paksa dan *culture stelsel*. Transmigrasi pada masa Kolonisasi tersebut, ditandai dengan perpindahan penduduk ke dari Pulau Jawa ke beberapa wilayah di antaranya Lampung (1905-1942). "Pada gelombang pertama sebanyak 155 keluarga dari Bagelen, Karesidenan Kedu, Jawa Tengah ditempatkan ke daerah Gedong Tataan Lampung yang saat ini merupakan ibukota Kabupaten Pesawaran. Program kolonisasi yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda ke Lampung tercatat sebanyak 44.687 KK dengan 175.867 jiwa yang berasal dari Jawa Tengah (5.839 KK dengan 25.25.718 jiwa), Jawa Timur (19.567 KK dengan 62.782 jiwa), dan daerah lain-lain (eks buruh kontrak dan Bangka) sebanyak 19.281 KK dengan 87.367 jiwa." Lihat buku Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. tahun 2015, hlm. 4.

(1969/1970-1998/1999), dan pasca Orde Baru (1999/2000-2009).¹⁰ Lebih dari satu abad arus transmigrasi telah digalakan oleh pemerintah saat itu, transmigran dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali datang dan bertempat tinggal di daerah Lampung.¹¹ Selain transmigran dari beberapa daerah di atas, terdapat beberapa transmigran dari daerah Banten dan pulau Sumatera yang juga ikut bertransmigrasi ke daerah Lampung.

Sejarah masuknya orang Bali ke Lampung Selatan tidak akan pernah lepas dari semangat seorang tokoh adat Lampung, Intas Mas Jahidin, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Negari Kalianda (sekarang bupati) periode 1957-1968, untuk mempraktikkan nilai-nilai moral suku Lampung, *Nemui Nyimah* yaitu terbuka dan menerima tamu dengan baik.¹² Dikutip dari catatan Pengantar Budisantoso, dalam buku, "Merajut Jurnalisme Damai di Lampung", bahwa Intan Mas yang ketika itu

¹⁰ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 2009. Buku Data Ketransmigrasian, hal 2-7.

¹¹ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, "Peta Kekerasan Indonesia (September-Desember 2013) dan Konflik Antarkelompok di Indonesia", *The Habibie Center*, Edisi 06 Maret 2014, hlm. 13.

¹² Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN. Pengantar Penyunting: Merajut Jurnalisme Damai di Lampung. Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012, hlm. xv-xvii.

menjabat sebagai Kepala Negari Kalianda sekaligus sebagai *penyimbang* adat kedatangan lima orang warga Bali ke rumahnya. Kelima orang tersebut menceritakan bahwa rumahnya telah hancur akibat terkena dampak letusan Gunung Agung tahun 1963 silam. Mereka menyampaikan niatnya untuk melanjutkan kehidupannya di tanah Lampung. Tidak sekedar memberikan tempat menumpang, namun Intan Mas juga menjanjikan akan memberikan tanah seluas dua hektare bagi setiap kepala keluarga. Setidaknya seluas 15.000 hektare tanah telah dihibahkan kepada sekitar 7.000 kepala keluarga dari Bali yang memutuskan untuk hidup di Lampung saat itu.¹³

Masyarakat Bali yang ada di Balinuraga sebagian besar berasal dari Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang lebih dikenal dengan sebutan Bali Nusa karena letaknya di sebelah Timur Pulau Bali. Pulau Nusa Penida merupakan daerah gersang, dan secara geografis letaknya “terasingkan”. Dilihat dari aspek sosio-historisnya, warga Pulau Nusa Penida digolongkan

¹³ *Ibid.*

sebagai *Jabawangsa*,¹⁴ sebutan lain dari *Sudrawangsa* atau orang *Sudra*.¹⁵

Jika diperhatikan secara saksama, struktur dan dimensi kehidupan sosial yang terbangun di Provinsi Lampung cenderung berbentuk *enklaf-enklaf* kesukuan. Terbukti dengan adanya perkampungan Lampung, Bali, Sunda dan suku lainnya. Hal inilah yang dikemudian hari menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya konflik identitas antar kelompok di Lampung Selatan.

Lampung dikenal dengan julukannya sebagai, “Indonesia Mini”, karena dengan komposisi masyarakatnya yang heterogen, mulai dari suku Lampung, Bali, Jawa, Sunda, Padang, Semendo, Komerling, Batak, Bugis, Tionghoa, Madura dan suku lainnya, mereka tetap dapat hidup berdampingan secara harmonis.¹⁶ Namun julukan

¹⁴ Sebutan *Jabawangsa* disematkan pada warga Pulau Nusa Penida, karena pada awalnya pulau tersebut merupakan tempat pembuangan para tahanan politik pihak kerajaan, pelaku praktek ilmu hitam dan kejahatan di lingkungan masyarakat ketika berada di pulau induk Bali. Status dan kedudukan orang yang mengalami pengasingan ke Pulau Nusa Penida akan secara otomatis lenyap dan menjadi orang *jaba*, yaitu orang luar. Lihat Setiawan, Wahyu, “Pasraman sebagai Media Pembentuk identitas Pasca Konflik”, *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 4 (1), 2015, hlm. 72.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN, *op. cit.*, hlm. 11.

tersebut kemudian dipertanyakan kembali setelah munculnya konflik kekerasan pada tanggal 28-29 Oktober 2012, di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.

Keperihatinan terhadap tragedi konflik kekerasan yang terjadi di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial yang terbangun belum cukup kuat dalam menopang dan mengukuhkan integrasi sosial sebagai bangsa yang plural tetapi tetap satu, *Bhineka Tunggal Ika*.

Fakta bahwa masih rapuhnya fondasi struktur kehidupan sosial di Provinsi Lampung, dikuatkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh dua lembaga terkemuka, yaitu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan The Habibie Center, berturut-turut mengungkapkan fakta bahwa pertama, LSI dan Yayasan Denny JA merilis hasil risetnya tentang lima wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk paska reformasi, yaitu 1) Maluku, Konflik Muslim-Kristen; 2) konflik etnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Barat; 3) kekerasan terhadap etnis Tionghoa tahun 1998, di Jakarta; 4) kekerasan terhadap kelompok penganut aliran Ahmadiyah di Mataram, yang dampaknya menjadikan

kelompok Ahmadiyah sebagai pengungsi sejak tahun 2005; dan terakhir 5) kekerasan atau konflik multietnik yang melibatkan kelompok pendatang Bali dan penduduk lokal Lampung, di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.¹⁷

LSI mengkonfirmasi data bahwa konflik berlatar etnik di Lampung Selatan yang berlangsung selama tiga hari, 27-29 Oktober 2012, menelan korban tewas sebanyak 14 Orang, 13 luka parah dan 1.700 orang mengungsi ke Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kemiling, Bandar Lampung. Sedangkan kerugian materil mencapai Rp. 24.88 miliar, dan sebanyak 532 rumah rusak dibakar.¹⁸

Kedua, The Habibie Center melalui SNP (Sistem Nasional Pemantau Kekerasan) merilis data bahwa bahwa jika ditinjau berdasarkan persebaran wilayahnya, kekerasan antar kelompok berbasis identitas dominan terjadi di tiga

¹⁷ Denny J.A. "Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi". Jakarta: Inspira.co, 2014, hlm. 44.

¹⁸ Yayasan Denny JA dan LSI Community, "Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman", Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012. Dari https://books.google.co.id/books?id=TO4xDwAAQBAJ&pg=PA24&dq=Dicari+Capres+2014+yang+Melindungi+Keberagaman&source=bl&ots=VZrScty2BJ&sig=UU_YlztDwXv1gVYBe_9gEkQ47k74&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEWj3o_6H1dLcAhWLFHoKHUNNB2UQ6AEwBHoECAyQAQ#v=onepage&q=lampung&f=true; diakses pada 4 Agustus 2018.

provinsi, yakni Papua, NTB, dan Lampung. Provinsi Lampung masuk dalam kategori wilayah yang rerata insiden dengan dampak korban tewas tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.¹⁹

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kerawanan konflik yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa hampir terjadi konflik komunal yang melibatkan pendatang dan penduduk asli di setiap kabupaten di Lampung, seperti kasus Menggala dan Gunung Terang (Tulang Bawang), Fajar Bulan (Lampung Barat), Jabung (Lampung Timur), dan terakhir yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan pada 27-29 Oktober 2012, berupa konflik etnis Balinuraga yang melibatkan pendatang Bali dan penduduk lokal Lampung.²⁰

Jika ditilik lebih jauh ke dalam, konflik laten yang muncul menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) dan konflik kekerasan di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan, 28-29 Oktober 2012 yang lalu adalah manifestasi dari akumulasi kekesalan dan kekecewaan (*frustrasi*) atas serangkaian konflik masa

lalu yang penyelesaiannya selalu tertunda dan tidak pernah tuntas. Maka, sewaktu-waktu ada pemicu, mereka dapat marah dan melakukan perlawanan (*agresi*).

Berdasarkan pada fakta yang dipaparkan di atas maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian atas upaya transformasi konflik yang dilakukan di Balinuraga, Lampung Selatan dalam rangka mewujudkan perdamaian positif yang berkelanjutan. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan, yaitu: 1) Kerusakan di Balinuraga menimbulkan efek mematikan dan kerugian materil yang cukup besar; 2) konflik identitas yang melibatkan kelompok tidak hanya antara transmigran dan penduduk lokal, tetapi juga melibatkan suku lainnya; 3) kompleksitas hubungan antara migran dan penduduk lokal; 4) penyelesaian yang tidak pernah tuntas; dan 5) kompleksnya sumber konflik yang ada. Maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana konflik di Balinuraga, Lampung Selatan dapat bereskalasi dari konflik laten menjadi menjadi konflik terbuka? dan 2) Bagaimana upaya transformasi konflik di

¹⁹ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, *op. cit.*, hlm. 9-10.

²⁰ Setiawan, Wahyu, *op. cit.*, hlm. 67-79.

Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan?

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian terhadap konflik kekerasan yang melibatkan pendatang dan penduduk lokal di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan adalah: 1) menganalisis faktor-faktor penyebab eskalasi konflik laten menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan; dan 2) menganalisis upaya transformasi konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan dan mengembangkan konsep transformasi yang baik guna mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Lampung Selatan.

Metode Penelitian

Berdasarkan studi kasus yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode dalam melakukan penelitian. Dalam bukunya “*Social Research Methode*” Alan Bryman mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah strategi penelitian yang lebih menitikberatkan pada pemakaian kata ketimbang penggunaan data-data

kuantifikasi dalam proses analisis dan koleksi data.²¹ Pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menentukan informan yang dijadikan sebagai sumber penggalian data, peneliti menggunakan dua teknik *sampling* yang termasuk kedalam kategori *nonprobability sampling*²², yaitu *purposive sampling*²³ dan *snowball sampling*.²⁴

Kerangka Konseptual

Teori dan konsep merupakan instrumen penting dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif misalnya, teori digunakan sebagai perspektif yang memberikan batasan dalam pemikiran peneliti, sehingga dalam proses analisis tidak akan terjadi

²¹ Alan Bryman, *Social Research Methods, Second Edition* (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 266-270.

²² *Nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel.

²³ Teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (dalam, Sugiyono, 2001: 6). Juga merupakan pemilihan sekelompok subjek berdasarkan pada ciri-ciri tertentu dan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam Margono, *Metodologi Penelitian Pendidika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 128.

²⁴ Secara sederhana teknik ini merupakan cara penentuan subjek penelitian yang mulanya berjumlah kecil dan terbatas, kemudian sampel ini memilih dan merekomendasikan teman dan rekannya untuk dijadikan sebagai sampel. Dalam Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2001).

pembauran dengan prespektif teori lainnya. Peneliti menggunakan beberapa kerangka teori dan konsep yang dikemukakan sebagai landasan berpikir, yaitu Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Identitas Sosial, Teori Kerja Sama, konsep SAT, Konsep Perdamaian, dan konsep Segitiga ABC Konflik Galtung.

Teori Konflik

Secara etomologis, konflik berasal dari bahasa Latin “con” yang artinya “bersama” dan “fligere” yang berarti “benturan atau tabrakan.”²⁵ Istilah konflik sosial secara umum mengandung makna sebagai suatu rangkaian peristiwa pertentangan, disharmonisasi dan pertikaian antar individu atau kelompok melalui konflik kelas, yang dimulai pada tahap pertentangan hingga ke titik kulminasinya, yaitu peperangan internasional.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai upaya memperjuangkan nilai dan pengakuan terhadap status yang langka dengan cara menetralsir kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan, serta

mengeliminir lawan-lawan politiknya.²⁶

Sedangkan, Soerjono Soekanto dalam bukunya, “Kamus Sosiologi” mendefinisikan konflik sebagai suatu proses mencapai tujuan dan kepentingan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.²⁷

Dahrendorf sendiri melihat masyarakat dalam dua rupa, yaitu konflik dan konsensus. Menurutnya, sebuah masyarakat tidak akan mengalami konflik jika tidak ada konsensus sebelumnya. Misalnya, kelompok A dan kelompok B tidak akan terlibat dalam konflik karena belum pernah hidup bersama dan tidak mengenal satu sama lain. Begitupun sebaliknya, konflik dapat mengantarkan kita terhadap konsensus. Contohnya, kerja sama atau aliansi yang saat ini dibangun oleh Amerika Serikat dan Jepang adalah hasil konsensus yang dibangun pasca terlibat dalam konflik dan perang besar pada masa Perang Dunia II.²⁸

²⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 345.

²⁶ Teori konflik Lewis A. Coser, dalam <http://crateridea.blog.uns.ac.id/2016/03/21/teori-konflik-lewis-a-coser/>; diakses pada 18 Agustus 2018.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.99.

²⁸ Tumengkol, Selvie M., “Teori Sosiologi Perspektif tentang Teori Konflik dalam Masyarakat Industri”, Karya Ilmiah Universitas Transformasi Konflik Sosial Antar-Etnis ... | 8

Berdasarkan sudut pandang yang dibangun Teori Konflik ini, peneliti akan menganalisis bagaimana konflik yang terjadi di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan mampu membawa perubahan yang positif dalam struktur sosial yang ada.

Segitiga ABC Konflik Galtung

Dalam bukunya, “*Peace by Peaceful Means*”, Galtung merumuskan bahwa konflik merupakan bangunan triadik yang tersusun atas tiga elemen, yaitu C (*conflict*) = A (*attitudes*) + B (*behaviour*) + C (*contradiction*).²⁹ Konflik dan kekerasan dapat dikatakan sebagai antitesis dari perdamaian. Sama halnya dengan perdamaian, konflik juga merupakan fenomena sosial yang melibatkan hubungan atau relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok *liyan*. Pola relasi yang demikian muncul, karena adanya kontradiksi (*contradiction*) antara sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*).³⁰

Sam Ratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Manado, 2012.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

³⁰ Webel, Charles & Galtung, Johan, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, (New York, Routledge, 2007), hlm. 71.

Peneliti menggunakan konsep Segitiga ABC Konflik Johan Galtung untuk menganalisa proses eskalasi konflik di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan, dari konflik yang awalnya bersifat laten menjadi konflik terbuka pada tanggal 27-29 Oktober 2012.

Konsep Perdamaian

Damai dalam perspektif Galtung diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu *negative peace* (damai negatif) dan *positive peace* (damai positif) yang merujuk pada tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan kultural, struktural dan kekerasan langsung (*direct violence*).³¹ Perdamaian negatif oleh Galtung didefinisikan sebagai suatu keadaan damai tanpa adanya kekerasan kolektif yang terorganisir (*absence of organized collective violence*). Sedangkan perdamaian positif merujuk pada suatu kondisi dimana terdapat nilai-nilai (*value*) yang secara umum disepakati bersama oleh setiap entitas masyarakat pada suatu wilayah tertentu, seperti bebas dari rasa takut (*free of fears*), pertumbuhan ekonomi dan

³¹ Zainal, Suadi, “Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi,” *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21 (1), 2016, hlm. 84-85.

kesejahteraan sosial, kerja sama, bebas dari eksploitasi, ada persamaan hak dan kesempatan, keadilan, pluralisme, partisipasi, bebas bertindak dan wujud keadilan sosial lainnya.³²

Peneliti menggunakan konsep perdamaian sebagai alat sekaligus indikator untuk melihat apakah proses transformasi konflik sosial antar etnis di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan berjalan dengan baik sehingga memunculkan perdamaian yang berkelanjutan.

Transformasi Konflik

Untuk menganalisis konflik di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan, peneliti menggunakan teori transformasi konflik sebagai tahapan rekonstruksi pasca konflik yang muncul setelah upaya resolusi konflik dilakukan. Teori ini dipopulerkan oleh Lederach melalui karya-karyanya yang mengasumsikan bahwa dinamika pasang dan surut konflik sosial memberi peluang dan ruang dalam kehidupan, untuk melakukan suatu perubahan yang bersifat konstruktif, guna meminimalisir angka kekerasan dan mendorong terwujudnya keadilan yang merata dalam

³² *Ibid.*

berbagai sektor kehidupan sosial.³³ Transformasi konflik bertumpu pada upaya menciptakan perubahan hubungan dalam konflik dan pembangunan pasca konflik, bukan mengendalikan terlebih menihilkan konflik. Merujuk pada pemikiran John. P. Lederach bahwa dalam transformasi konflik setidaknya ada empat elemen pokok yang harus ditransformasikan, yaitu: 1) transformasi personal; 2) transformasi relasional; 3) transformasi kultural; dan 4) transformasi struktural.³⁴

Teori Identitas Sosial

Identitas memainkan peran yang sangat vital dalam konflik sosial. Identitas juga merupakan basis fundamental bagaimana cara seorang individu atau kelompok melihat dan memahami diri mereka dalam situasi konflik.³⁵ Identitas dapat

³³ "Conflict transformation is to envision and respond to the ebb and flow of social conflict as life-giving opportunities for creating constructive change processes that reduce violence, increase justice, in direct action and social structures, and respond to real-life problems in human relationships" Lihat dalam L. Mc. Opiyo, *Music as Education, Voice, Memory and Healing : Community Views on the Role of Music in Conflict Transformation in Northern Uganda*, hlm. 44.

³⁴ Lederach, J. P. *The Little Book of Conflict Transformation*, (STL: Distribution North America, 2003), hlm. 24-27, dalam Zainal, Suadi, *op. cit.*, hlm, 85-86.

³⁵ Celia Cook-Huffman, *The role of identity in conflict*, lihat *Handbook of Conflict Analysis and Transformasi Konflik Sosial Antar-Etnis ...* | 10

menggambarkan siapa “kita” dan siapa “mereka”, mampu memobilisasi individu dan kelompok, serta memberikan legitimasi dan justifikasi atas aspirasi seseorang atau kelompok.³⁶

Ho-Won Jeong dalam bukunya yang berjudul, “*Conflict Management and Resolution*”, memperkuat pendapat di atas bahwa dalam situasi konflik, formasi identitas dibentuk oleh konteks permusuhan antar kelompok. Menguatnya kohesivitas dan soliditas dalam suatu kelompok akan membangun eksklusivitas yang merangsang munculnya rasa keterancaman (*security dilemma*, dalam bahasa peneliti) terhadap kelompok lain sehingga dapat mendorong pada arah permusuhan. Dampaknya adalah identitas kemudian dijadikan sebagai komoditas atau sumber yang paling efektif untuk memobilisasi kelompok karena dirasa adanya ketidakadilan serta perampasan hak dalam sebuah persaingan.³⁷

Resolution, Edited by Dennis J. D. Sandole et.al., (New York: Routledge, 2011), hlm. 19-30.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Identitas biasanya digolongkan berdasarkan etnik, suku, kelas, kasta, jender, dan ras, sering digunakan sebagai legitimasi dan justifikasi terhadap ketidakadilan distribusi sumber daya dan serta penindasan secara politik, hlm. 59, lihat Jeong, Ho-Won, *Conflict Management and Resolution: an Introduction*, (New York: Routledge, 2010), hlm. 60.

Tajfel merumuskan identitas sosial sebagai bagian dari konsep diri yang datang dari keanggotaan dalam sebuah kelompok bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dalam keanggotaan tersebut.³⁸ Peneliti menggunakan Teori identitas sosial Tajfel dan Turner untuk menjelaskan bagaimana identitas dapat dijadikan sebagai komoditi efektif untuk memobilisasi massa (suku Lampung) dari berbagai kabupaten di Provinsi Lampung yang secara bersama-sama melakukan penyerangan secara sporadis terhadap etnik Bali di Desa Balinuraga.

Konsep SAT

Peneliti menggunakan model analisa SAT ini untuk memudahkan dalam melakukan pemetaan konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan faktor konfliknya, yang mencakup tiga elemen utama, yaitu *pertama*, akar konflik atau faktor struktural, yaitu adalah faktor-faktor atau ‘latar belakang’ yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial. Faktor-faktor ini bisa meliputi eksklusi politik secara sistematis, kesenjangan ekonomi yang

³⁸ Turner, H. *Social Stereotypes and Social Groups*, dalam J.C. Turner and H. Giles (eds.) *Inergroup Behaviour*, (Oxford: Basil Blackwell, 1981).

inheren, ketiadaan institusi yang memadai dan responsif, pergeseran dalam hal keseimbangan demografis, kemerosotan ekonomi, dan kerusakan ekologis terhadap wilayah.³⁹

Kedua, akselerator. Dalam terminologi Ichsan Malik akselerator ini diibaratkan sebagai katalisator atau angin panan yang dapat menyebarkan konflik ke segala arah.⁴⁰ Masih menurut Ichsan bahwa akselerator merupakan manifestasi suatu reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik.

Dan terakhir *ketiga*, faktor pemicu, yaitu kejadian tiba-tiba yang memicu pecahnya konflik. Dalam bahasa yang mudah dipahami Ichsan Malik secara sederhana menganalogikan *trigger* sebagai elemen “api” yang dapat menyambar dan menghanguskan “hampan rumput kering” (elemen struktural). Biasanya *trigger* muncul secara tiba-tiba dalam rangkaian kejadian konflik.⁴¹ Contoh dari Pemicu adalah pembunuhan tokoh penting, kecurangan dalam pemilihan umum, dan skandal politik. Sebagai misal, pembunuhan

tokoh atau pemimpin kelompok tertentu, perusakan simbol-simbol identitas dan lain sebagainya. Pemicu bersifat jangka pendek dan sporadis.⁴²

Ketiga elemen ini akan sangat membantu peneliti untuk memahami situasi atau prakondisi yang mendorong eskalasi dan de-eskalasi konflik kekerasan yang terjadi di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Terulangnya bentrok antar warga pendatang dan pribumi di Balinuraga, Lampung Selatan, yang mengakibatkan kerugian jiwa dan materil merupakan barometer lemahnya aparat pemerintah daerah dalam menyikapi suatu permasalahan yang mengarah terhadap konflik SARA, dan tidak adanya ketegasan tindakan secara hukum terhadap pelaku-pelaku kerusuhan dan bentrok antar warga yang menjadi dalang atau aktor utama dalam kerusuhan tersebut.

Muncul beragam perspektif terkait kronologis sebab munculnya konflik kekerasan di Balinuraga, Lampung Selatan, Oktober 2012. Berdasarkan data SNPK tahun 2012, The Habibie Center,

³⁹ Migdad, Muhammad *at al*, *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*, CEWERS, (Jakarta: Peace Through Development-BAPPENAS, 2012), hlm. 31-37.

⁴⁰ Malik, Ichsan, *loc. cit.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Migdad, Muhammad *at al*, *loc. cit.*

bahwa konflik kekerasan yang mampu mengerahkan massa penduduk lokal Lampung dari desa di sekitar Kecamatan Way Panji dan seluruh penjuru Provinsi Lampung, dipicu oleh insiden pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga terhadap dua gadis Lampung, bernama Nurdiyana Dewi (18 tahun), warga Desa Agom Kecamatan Kalianda, dan Emiliya Elisa (17 tahun), warga Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda, pada hari Sabtu 27 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 WIB.⁴³

Kronologi peristiwa konflik kekerasan di Balinuraga bermula saat kedua gadis Lampung, Diana dan Emi, berboncengan mengendarai sepeda motor usai berbelanja peralatan *make up* pada sebuah minimarket di Desa Patok-Sidoharjo Kecamatan Way Panji. Dalam perjalanan pulang, keduanya melewati segerombolan pemuda Balinuraga yang sedang menunggangi sepeda (Data SNPK, mencata terdapat 10 orang pemuda Balinuraga). Tidak disangka seorang pemuda berusaha memegang paha Emi. Emi, yang posisinya dibonceng oleh Diana, berusaha menepisnya. Namun, karena jumlah pemuda yang lebih banyak, fokus dan keseimbangan

Diana buyar sehingga sepeda motornya terjatuh.⁴⁴ Keduanya berusaha ditolong seorang warga Desa Balinuraga, untuk diangkat ke pinggir jalan. Tak lama setelah Diana menghubungi keluarganya, kakaknya datang dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, keduanya diurut dan diobati karena mengalami luka memar di siku dan lutut. Sementara orang tua menunggu anaknya diurut, di luar sudah berkerumun massa yang datang dari desa tetangga bersiap untuk memberi pelajaran pada pemuda Balinuraga yang dianggap sudah keterlaluan dan menghina *pi'il* atau harga diri suku Lampung.⁴⁵ Inilah salah satu alasan mengapa konflik menjadi membesar, yaitu dalam tata kehidupan sosialnya, orang Lampung memegang prinsip *Piil Pesengiri* yang menempatkan harga diri dalam posisi tertinggi. Sehingga, ketika mereka merasa harga dirinya telah dicerai oleh kelompok lain, maka akan sangat mungkin terjadi gesekan sosial yang memicu terjadinya konflik terbuka.

Kabar menyebar lebih cepat dari perkiraan, pada hari Minggu, 28 Oktober 2012, ratusan orang berkumpul kembali

⁴³ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, *op. cit.*, hlm. 14.

⁴⁴ Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN, *op. cit.*, hlm. 4.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

di perempatan Jalan Way Harong. Kali ini massa berdatangan hingga dari luar Lampung Selatan. Mereka siap melakukan penyerangan dan akhirnya konflikpun tak dapat dihindari, sehingga menjatuhkan tiga korban meninggal. Pada hari ketiga, Senin 29 Oktober 2012, konflik kekerasan dalam skala besar semakin tidak dapat dicegah oleh aparat kepolisian dan TNI yang berjumlah 2.100 personel, sedangkan jumlah massa mencapai belasan ribu.⁴⁶ Akhirnya konflik memakan korban jiwa yang tidak sedikit dan kerugian materil yang cukup besar.

Dikutip dari Laporan Penelitian LPM Unkris, Panggabean menandakan bahwa terulangnya konflik Lampung menjadi indikator gagalnya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan keamanan, yang dinilai tidak mampu mencegah terjadinya konflik kekerasan yang melibatkan etnis Bali dan penduduk lokal Lampung. Aparat kewanaman gagal dalam mende-eskalasi ketegangan dan mencegah konflik kekerasan karena intervensi dilakukan setelah konflik mulai meluas.⁴⁷

Pemerintah Daerah dianggap gagal dalam melakukan upaya penangan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 5-10.

⁴⁷ Laporan Penelitian LPM Unkris, dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018.

konflik sosial di Balinuraga seperti yang diamanatkan dalam UU No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, yaitu seyogianya pemerintah harus melakukan: *Pertama*, upaya pencegahan (pasal 1), dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Namun, realisasinya lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah seperti FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) belum dimaksimalkan perannya karena kurangnya sumber daya dan anggaran; *kedua*, penghentian konflik dalam pasal 12; dan *ketiga*, pemulihan pasca konflik yang meliputi tahap rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Daerah dalam hal ini gagal dalam melakukan penghentian terhadap konflik kekerasan yang terjadi karena hanya berorientasi pada upaya penghentian kekerasan, bukan penghilangan akar konflik sehingga konflik dapat muncul kembali sewaktu-waktu.

Faktor-faktor Konflik

Faktor struktural. Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor konflik, dan ditinjau dari aspek sosio historis

provinsi Lampung, peneliti menemukan bahwa transmigrasi penduduk sebagai latar belakang yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial di Provinsi Lampung terutama konflik di Bainuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Lampung sebagai daerah tujuan transmigrasi yang dijalankan mulai dari masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1905 hingga masa reformasi, ternyata meninggalkan persoalan besar yang harus dihadapi pemerintah saat ini. Kondisi semacam ini secara signifikan berpengaruh terhadap dominasi pendatang, yang secara statistik, populasinya lebih besar dibandingkan penduduk lokal Lampung yang hanya sekitar 11,92% dari jumlah total penduduk Provinsi Lampung saat ini. Implikasi migrasi dan pergeseran dominasi adalah bentuk kemunduran etnik lokal.

Ketidakseimbangan proporsi tersebut membuat etnik Lampung terdesak oleh pendatang yang berkembang dan menguasai sumber-sumber strategis seperti ekonomi, lahan, dan dunia pendidikan. Senada dengan pernyataan di atas, Kepala Pusat Studi Kebudayaan Lampung Universitas Lampung, Nina Yuda mengatakan bahwa dalam kultur kehidupan orang Lampung

memiliki gelar adat merupakan bagian dari keistimewaan dan harga diri yang disebut sebagai *Pi'il Pesenggiri*. Tinggi rendahnya *pi'il pesenggiri* seseorang sedikitnya ditunjukkan pada tiga hal yang saling berelasi, yaitu *adok* (gelar), perempuan dan harta. Bagi sebagian orang, kuatnya keinginan mendapatkan *adok* membuat mereka rela berkorban harta benda. *Ber-adok*, dinilai salah satu pencapaian *pi'il pesenggiri*. Ironisnya, dibalik gemerlapnya *begawi adok* ternyata berpotensi menimbulkan perseteruan keluarga, bahkan dapat membuat keluarga jatuh miskin. Mahalnya biaya *begawi adok* bahkan menelan hingga ratusan juta. Akibatnya setelah pesta usai, *adok* didapat, konsekuensinya jatuh miskin. Tanah-tanah pusaka, warisan banyak yang dijual demi melaksanakan ritual tersebut. Terjadilah peralihan aset-aset ekonomi dari suku Lampung terhadap penduduk pendatang, seperti Bali.⁴⁸

Selain itu transmigrasi juga menciptakan eksklusifitas antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Faktanya bahwa para pendatang itu

⁴⁸ Wawancara dengan Dr. Nina Yuda selaku Kepala Pusat Studi Kebudayaan Lampung Universitas Lampung pada tanggal 24 September 2018 di Gedung Rektorat Universitas Lampung Lantai 3.

hidup persis seperti di Jawa, di bawah pamong desa sendiri dan dalam susunan masyarakat sendiri. Struktur sosial yang berbentuk enklaf-enklaf kedaerahan tersebut menimbulkan pertentangan antara pendatang dan pribumi, sehingga menimbulkan friksi diantara keduanya.

Kemudian, ini diperparah lagi dengan kebijakan pemerintah yang cenderung diskriminatif atau bahkan sewenang-sewenang terhadap penduduk asli Lampung. Pemerintah memberikan alokasi-alokasi tanah kepada para agro-bisnis raksasa sehingga seluruh “*hinterland*”, daerah penyangga kediaman suku bangsa Lampung yang secara tradisional merupakan lahan tempat mereka mencari nafkah, praktis tidak ada yang tersisa. Akibatnya sebagian besar suku asli Lampung terjepit dari segala arah. Sejalan dengan dalil demografis yang menyatakan, bahwa “suatu puak atau suku bangsa yang kemudian menjadi minoritas (mutlak) di dalam habitatnya sendiri, lambat atau cepat berkecenderungan akan menuju kepada kepunahannya”.⁴⁹ Misalnya saja suku bangsa *Indian* di benua Amerika, *Aborigin* di Australia dan

Maori di Selandia Baru adalah contoh sebagian kecil suku bangsa yang menjadi minoritas di tanahnya sendiri, tergempur oleh dinamika deras arus masuk para transmigran yang kemudian menjadi mayoritas dengan segala kemajuan yang dimilikinya.

Faktor akselerator. Terjadinya rentetan konflik tersebut sejak tahun 2005 hingga Oktober 2012 antara warga Bali dengan suku asli Lampung menjadi katalisator yang menyebabkan intensitas konflik semakin membesar karena dendam yang sudah mengakar. Akibatnya, sentimen dan ego kelompok dikedepankan, solidaritas sosial internal (*ingroup*) menguat melebihi batas-batas wilayah komunitas inti konflik, dimana semua suku Lampung dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung ikut berkumpul dan membantu penyerangan terhadap warga Bali di Desa Balinuraga.

Pada tahap ini, identitas kesukuan menjadi momok yang menakutkan. Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul, “*Kekerasan dan Illusi tentang Identitas*” menjelaskan bahwa suku dan agama merupakan bagian dari identitas sosial,

“...memiliki suatu identitas tidak hanya menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan,

⁴⁹ Jusuf Badri, *Raden Intan: Jatidiri Kepahlawanan Orang Lampung*, (Jakarta: Pustaka Ilmu Abadi, 2002), hlm. 17.

melainkan pula sumber tumbuhnya kekuatan dan kepercayaan diri. Namun demikian, identitas juga dapat memicu pembunuhan dan membuat orang mati sia-sia".⁵⁰

Fenomena konflik sosial antar etnis Bali dan Lampung di Balinuraga pada Oktober 2012 silam menguatkan tesis Amartya Sen (2007), bahwa permusuhan yang timbul dari eksklusivitas bisa berjalan bergandengan tangan dengan manfaat yang timbul dari sikap eksklusif.⁵¹ Eksklusivitas dalam sebuah kelompok dapat melahirkan kohesi sosial *ingroup* yang semakin kuat dan sikap *altruistik* untuk membela kelompoknya, tetapi sebaliknya memperlebar *social distance* dan jurang perbedaan dengan kelompok lain (*outgroups*) yang bertendensi menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap orang di luar kelompoknya.

Faktor pemicu. Pecahnya konflik kekerasan di Balinuraga Kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga terhadap dua gadis suku Lampung. Mengapa hal yang sepele demikian dapat

memicu terjadinya konflik yang lebih besar?. Jika ditinjau lebih dalam tentang pandangan hidup masyarakat suku Lampung, antara lain terhadap kaum wanitanya yang sangat digarisbawahi. Bukan dalam arti emansipatoris modern, tetapi dalam arti tradisional dimana kehormatan serta kedudukan seorang wanita sangat dinjunjung tinggi. Ini antara lain dilambangkan dalam tarian adat Lampung yang disebut NIGEL atau Tigel-Tari: wanita dalam pakaian adat lengkap berdiri tegak dan tidak bergerak di atas sebuah talem kuningan, *brass salvers*, kecuali jari jemarinya yang bertanggung yang bergerak-gerak lambat mengikuti irama gamelan Lampung yang sedang ditabuh, sedangkan beberapa orang prianya, juga dengan pakaian adat lengkap, termasuk penyandangan keris yang hulunya dihadapkan kedepan, berputar-putar lincah bersemangat mengitari sang gadis. Ini mencitrakan tekad bulat tanpa kompromi dalam bentuk apapun juga, siap sedia mempertahankan kesucian serta kehormatan sang gadis.

⁵⁰ Amrtya Sen, *Kekerasan dan Illusi tentang Identitas* (penerjemah: Arif Susanto), (Serpong: Marjin Kiri, 2007), hlm. 3-4.

⁵¹ Amartya Sen, *Op. Cit.*

Eskalasi Konflik Laten Menjadi Konflik Terbuka

Situasi ini terjadi, karena mereka (suku Lampung) merasa adanya urgensi terhadap penyelesaian suatu masalah yang dianggap begitu serius, namun pemerintah cenderung bersikap abai dan lamban. Akibatnya penyelesaian selalu tertunda dan tidak pernah menyentuh hingga ke akar-akarnya, terjadilah akumulasi kekecewaan. Maka suatu ketika muncul pemicunya, akan ada luapan kemarahan dan perlawanan (agresi) yang diperkeruh dengan kondisi objektif (konteks) yang melatarinya, yaitu berupa kesenjangan ekonomi, kebijakan pemerintah yang diskriminatif, serta kondisi yang menyebabkan mereka (suku Lampung) teralienasi dari tanahnya sendiri. Kondisi yang demikian menjadi sebab munculnya frustrasi, dan frustrasi muncul karena perasaan tidak puas (*deprivasi relative*), yaitu adanya kontradiksi antara *das sollen* (yang diharapkan, *attitude* (A)) dengan *das sein* (kenyataan yang dialami, konteks (C)). Jika *deprivasi relative* suatu kelompok tidak ditanggapi, maka akan meningkatkan rasa frustrasi. Semakin frustrasi akan semakin marah, dan dalam keadaan marah konflik laten bertendensi

besar mencuat menjadi konflik terbuka (*Behaviour* (B)) yang biasanya disertai dengan tindak kekerasan disebut *destructive conflict*.

Transformasi Konflik

Umumnya konflik sosial menyebabkan perubahan terhadap empat dimensi, yaitu personal, relasional, struktural dan kultural. Pasca terjadinya konflik sosial antaretnik Bali dan Lampung di Balinuraga terdapat banyak perubahan baik dalam pola hubungan personal, interpersonal, intrakomunal dan interkomunal, mulai ada penguatan budaya, revitalisasi identitas, dan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keserasian sosial⁵² guna memperkokoh ketahanan sosial.

⁵² Keserasian sosial (*social harmony*) diartikan sebagai: "suatu kondisi kehidupan bersama antar kelompok sosial yang guyub (tampak selaras), rukun (dirasa serasi) dan saling menguntungkan (hasil seimbang)". Ketiga unsur tersebut bekerja secara sinergis dan 'dinamis' karena dalam realitasnya tidak ada suatu masyarakat yang ekstrim serasi. Makna konsep "keserasian sosial" yang peneliti maksudkan adalah yang murni diinginkan dalam tatanan kehidupan bersama masyarakat manusia, bukan lekat dengan kekuasaan (*power*) yang secara historis sudah menyimpang dari makna esensinya, seperti tatanan masyarakat yang berlaku di Jawa dan tata kenegaraan Indonesia masa lalu. lihat Hartoyo, *Memutus Mata Rantai Konflik di Lampung*, dalam buku *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*, (Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012), hlm. 34.

Transformasi personal. Pasca berakhirnya konflik kekerasan di Balinuraga pada tanggal 29 Oktober 2012, berbagai pihak mengakui telah banyak perubahan sikap dan perilaku baik secara personal maupun komunal di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Hal ini tergambar dalam penjelasan yang dituturkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Agom saat peneliti temui di Kantor Desa Agom bahwa:

“... menurut informasi, setelah ditetapkan perjanjian kalau terjadi misalnya seperti ini lagi, maka hanya yang bersangkutan yang dikenakan sanksi itu. Oknumnya lah, jangan sampai membawa kelompok suku atau etnis tertentu. Kalo untuk hubungan selama ini ya masih baik ya, istilahnya ketika ada acara nyepi ogoh-ogoh kita diundang kesana gak apa-apa. Tapi sekarang memang sudah agak berkurang, kalo misal hiburan organ tunggal sekarang orang Balinya udah gak kaya dulu lah istilahnya, menguasai panggung. Bahkan sekarang kliatannya udah gak ada lagi. Jadi betul-betul ada perubahan hubungan yang signifikan pasca terjadinya konflik. Setelah konflik ini jelas betul perubahannya, kalau seperti dulu misalnya mereka (orang Bali) kalo ke pasar aja udah kaya seenaknya sendiri geber-geber itu. Sekarang setau saya udah jarang orang Bali yang mau kesini. Tapi walaupun kita

*lewat kesanapun gak ada masalah orang Jawa, Lampung asal kita memang sudah tau mereka, sekarang gak terjadi konflik lagi lah. Gak saling ngeliatin gitu itu, gak sekarang! kalo dulu memang pernah seperti itu. Kalo misal kita lewat dia ngeliat aja udah marah bawaannya. Kalo sekarang, semenjak konflik itu hingga sekarang belum pernah kejadian. Jadi bisa membatasi diri sekarang”.*⁵³

Hal yang sama juga disampaikan oleh beberapa narasumber baik dari pemerintahan desa, kecamatan, kesbangpol, warga dan akademisi. Perubahan sikap dan perilaku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa konflik tidak akan meninggalkan efek positif, melainkan justru menimbulkan dampak kerugian bagi kedua belah pihak, baik kerugian materil maupun korban jiwa.

Transformasi relasional. Tujuan utama dari transformasi relasional adalah menciptakan hubungan antara kelompok yang berbeda dalam suatu lingkungan kemsayarakatan. Ilmuwan evolusi sosial, Alexander mengungkapkan bahwa altruisme dan kerjasama merupakan produk yang dihasilkan dari sejarah

⁵³ Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Agom Kecamatan Kalianda di Kantor Desa Agom pada tanggal 5 Oktober 2018.

konflik antar kelompok dan perang, yang kemudian secara alami membentuk psikologi dan perilaku manusia. Hal ini sejalan dengan penganut aliran pemikiran Strukturalis Marxist yang mengatakan, bahwa untuk mencapai suatu perubahan yang besar (*radical change*) dalam sistem kehidupan membutuhkan pendekatan revolusioner, yaitu untuk menghentikan konflik dibuat konflik yang lebih besar.

Maka pasca terjadi konflik kekerasan yang menyebabkan kerugian besar baik secara materi maupun imateri dari kedua pihak, mulai tumbuh kesadaran bahwa damai itu penting. Muncullah kerjasama sebagai bentuk kesadaran bahwa ada kepentingan bersama yang lebih besar melampaui kepentingan personal dan kelompok yaitu menciptakan harmoni dalam hidup berdampingan sesama warga Lampung.

Tingkat komunikasi yang terjalin baik pada level individu atau kelompok, antara warga Bali di Balinuraga dan warga suku Lampung di Desa Agom, sudah cukup baik. Berdasarkan pada data lapangan dan hasil penelitian, telah tercipta hubungan kerjasama terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kepala Desa Agom, Muchsin Syukur

menuturkan bahwa warga dua desa sebenarnya saling membutuhkan. Pohon kelapa yang banyak tumbuh di lingkungan Desa Agom tidak akan bernilai ekonomis tanpa keberadaan masyarakat Bali. Made Santre, Kepala Desa Balinuraga, saat diwawancarai pada 5 Oktober 2018 mengungkapkan bahwa Kerjasama yang sebelum terjadi konflik sudah baik, pasca terjadinya konflik hubungan sosial kerjasama dan kemasyarakatan juga sudah normal kembali.

Pada level komunal, hubungan dirajut kembali melalui sistem *anjang sana* yaitu saling bersilaturahmi antara tokoh adat Bali, Lampung dan suku lainnya, tokoh pemuda, tokoh agama, dan juga aparatur pemerintahan desa. Misalnya saja di Kecamatan Way Panji, pemerintah telah berupaya menciptakan kegiatan di masing-masing adat, seperti mengundang tokoh adat, baik dari suku Lampung, Bali, Jawa atau suku lainnya, saat ada acara hajatan dan acara adat suku tertentu.

Transformasi kultural. Di Lampung terdapat beragam alternatif penyelesaian konflik (*alternative dispute resolution/ ADR*) yang mengedepankan jalan penyelesaian non-litigasi. Mediasi

melalui serangkaian musyawarah untuk mencapai mufakat masih menjadi cara yang paling efisien dan terus dikembangkan. Kecenderungan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik, selain dipegaruhi oleh nilai-nilai dasar hubungan sosial yang bersifat konsensus, juga karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosio kultural setempat. Dalam hal ini peran tokoh adat, tokoh masyarakat, tradisi, kepercayaan, struktur kelembagaan yang dimiliki dan diakui bersama pada tingkat desa dan kecamatan masih sangat diperlukan, karena masih kuat pengaruhnya serta menjadi elemen utama penyelesaian konflik.

Ulung Lampung memiliki falsafah pandangan hidup ber-*pi'il pesenggiri* sebagai karakter yang masih dipegang erat dan bertahan dalam gerusan serta arus globalisasi. Begitupun warga Bali juga memiliki nilai-nilai adiluhung Hindu dharma yang terangkum dalam konsep Tri Hita Karana. Meski kedua kelompok suku Bali dan suku Lampung memiliki tradisi, adat, budaya dan agama yang berbeda, namun secara garis besar falsafah pandangan hidup yang dipegang erat oleh keduanya memiliki nilai-nilai

yang saling bersinggungan. Misalnya dalam adat dan tradisi, baik suku Bali maupun suku Lampung memiliki mekanisme pencapaian konsensus atau kesepakatan bersama melalui jalur musyawarah atau *rembug*.

Dalam tradisi *ulun* Lampung musyawarah mufakat merupakan manifestasi dan implementasi dari falsafah *sakai sambayan* yang berarti gotong royong. Sementara dalam tradisi dan adat suku Bali, musyawarah mufakat merupakan wujud dari nilai *salulung sebayantaka* yang biasa digunakan sebagai alat mencapai konsensus bersama berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran.

Adanya persamaan tradisi yang dikedepankan dalam proses pencapaian kesepakatan dan penyelesaian masalah bersama melalui musyawarah. Maka pemerintah daerah Provinsi Lampung berinisiatif melakukan institusionalisasi budaya *rembug pekon* melalui Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2016 (sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya) sebagai mekanisme penyelesaian konflik baik pada tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

Transformasi struktural. Beberapa upaya transformasi secara struktural yang dilakukan pemerintah antara lain, intitusionalisasi budaya *rembug pekon* sebagai mekanisme penyelesaian konflik (telah dijelaskan pada sub bab transformasi kultural), penguatan lembaga adat seperti MPAL (Majelis Penyimbang Adat Lampung), penguatan institusi keamanan TNI/POLRI melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta penguatan institusi daerah seperti Kesbangpol, FKUB, FKDM, dan FOKMAL.

Pasca konflik Balinuraga, jejaring antar tokoh adat dalam penguatan struktur adat Lampung dan Bali semakin baik, serta didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Penguatan lembaga-lembaga adat ini berfungsi untuk menjadi saluran bagi kepentingan anggotanya. Jadi ada kekuatan yang sengaja dibina untuk menjadi ruang komunikasi diantara para elit lokal suku Bali dan Lampung, misalnya sering bersilaturahmi baik secara verbal maupun langsung dengan elit-elit suku Bali, Jawa dan suku-suku lainnya yang ada di Lampung Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi gejolak di bawah, diantara mereka kompak, masalah dapat diredam dan pemerintah daerah tertolong dengan itu.

peneliti mendapati bahwa pemerintah daerah masih belum berhasil melakukan upaya transformasi struktural pasca konflik di Balinuraga yang meliputi tiga elemen, yaitu kondisi sosial, pola prosedural, dan pola institusional. Kondisi sosial misalnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2017 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung mendapat raport merah dalam hal diskriminasi rasial dan etnik, yaitu masih kentalnya penggunaan kekerasan atau ancaman oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok hak-hak politik (33,33), serta penggunaan kekerasan atau ancaman oleh pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat (54,17); pola prosedural yaitu masih kecilnya angka kebebasan berpendapat (53,47) dan pasrtisipasi politik (57,76); dan terakhir pola institusional yaitu belum optimalnya peran birokrasi pemerintah daerah (44,21).

Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta dan data lapangan di atas, maka peneliti mengambil satu kesimpulan bahwa perdamaian yang tercipta di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan masih bersifat “semu” atau damai negatif.

Meskipun pola hubungan kerjasama mulai berjalan dengan baik, ada pengakuan dan penghormatan terhadap hak kelompok lain, dan distribusi sumberdaya semakin merata, namun masih ada beberapa *Positive Peace Index* (PPI) yang belum tercapai. Misalnya, masih lemahnya sumber daya manusia ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung Selatan yang tergolong lebih rendah (66,95), dibandingkan dengan Bandar Lampung (75,98), Metro (75,87), Lampung Tengah (68,95), Pringsewu (68,61), Lampung Timur (6,05), dan Tulang Bawang (67,07) (BPS Provinsi Lampung, 2017). Kemudian, tingkat keterbukaan informasi, peran birokrasi pemerintah, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan masih rendah dibuktikan dengan indeks demokrasi Lampung yang masuk dalam urutan 26 dengan poin 72,01 dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2017.

Apabila kondisi yang demikian tidak mendapat perhatian pemerintah, maka tidak mustahil akan muncul kekecewaan masyarakat akibat adanya rasa ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa, karena akar permasalahan

berupa disparitas ekonomi, diskriminasi etnik dan rasial belum terselesaikan secara tuntas. Sehingga sewaktu-waktu ada pemicu, konflik serupa sangat mungkin untuk terulang kembali.

Dengan demikian, perbaikan harus dilakukan dalam berbagai aspek baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Perbaikan dan pembangunan menuju damai yang positif ini tentu memerlukan waktu yang panjang, dan menuntut peran aktif semua pemangku kepentingan serta andil masyarakat sebagai populasi mayoritas dalam kehidupan sosial

Kesimpulan

1. Pecahnya konflik Balinuraga dilatari oleh beberapa faktor yaitu faktor struktural berupa disparitas akses dan kontrol sumber daya, kebijakan yang diskriminatif, kesewenangan dalam pengambilan keputusan serta adanya kesenjangan ekonomi yang inheren; faktor akselerator berupa identitas kesukuan dan belum terselesaikan secara tuntas serangkaian konflik yang terjadi sebelumnya menjadi katalisator

penyebab intensitas konflik semakin membesar, selain karena dendam yang sudah mengakar.

2. Pasca terjadinya konflik sosial antaretnik Bali dan Lampung di Balinuraga terdapat banyak perubahan baik dalam pola hubungan personal, interpersonal, intrakomunal dan interkomunal, mulai ada penguatan budaya, revitalisasi identitas, dan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keserasian sosial guna memperkokoh ketahanan sosial. Jika upaya transformasi konflik atau rekonstruksi mengacu pada Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial (PKS), maka pemerintah telah melakukannya dengan maksimal dan optimal karena transformasi konflik hanya menekankan kepada rekonstruksi jangka pendek dan bersifat fisik. Tetapi jika rekonstruksi yang dimaksud adalah transformasi konflik dalam konsep yang dikembangkan Lederach, yaitu bagaimana menciptakan kondisi yang rusak akibat konflik menjadi

kondisi yang baik, dari destruktif menjadi konstruktif, rekonstruksi yang bukan hanya aspek fisik tetapi juga menjangkau aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, maka tahapan belum terjangkau secara optimal dan maksimal. Sehingga belum nampak upaya yang sifatnya terstruktur dan terencana untuk melakukan rekonstruksi dalam artian yang lebih dalam.

Saran

1. Pecahnya konflik kekerasan di Balinuraga menjadi indikasi masih lemahnya pengelolaan konflik konstruktif di Provinsi Lampung. Pemerintah harus menciptakan berbagai kegiatan yang terencana, terprogram, terpadu dan terarah sebagai upaya mengelola konflik (yang meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik).
2. Gagalnya proses pembauran dan akulturasi budaya antara etnis Bali dan Lampung menciptakan eksklusifitas sebagai benih yang melatari terjadinya konflik Balinuraga pada 29 Oktober 2012.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menciptakan program pembauran antar kelompok suku bangsa atau relokasi kampung Bali secara bertahap agar terjadi proses akulturasi dan komunikasi budaya antar kelompok etnis tidak buntu, sehingga struktur sosial yang berbentuk enklaf kesukuan dapat terurai. Dengan demikian sentimen dan ego antar suku bangsa dapat diminimalisir sehingga terwujud perdamaian yang berkelanjutan di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

3. Rekonstruksi (transformasi konflik) menuntut peran aktif dari multipemangku kepentingan yang meliputi pemerintah daerah, TNI/POLRI, kesbangpol, tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga adat, FKUB, FKDM dan masyarakat bawah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Badri, Jusuf. 2002. *Raden Intan: Jatidiri Kepahlawanan Orang Lampung*. Jakarta: Pustaka Ilmu Abadi.
- Bryman, Alan. 2004. *Social Research Methods, Second Edition*. New York: Oxford University Press.
- Budiman, Budisantoso, et al. 2012. *Jurnalisme Damai di Lampung*, Bandar Lampung: Aji Bandar Lampung.
- Celia Cook-Huffman. 2011. *The role of identity in conflict*, lihat *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*, Edited by Dennis J. D. Sandole et al. New York: Routledge.
- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 2009. *Buku Data Ketransmigrasian*.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jeong, Ho-Won. 2010. *Conflict Management and Resolution: an Introduction*. New York: Routledge.
- Lederach, J. P. 2003. *The Little Book of Conflict Transformation*. STL: Distribution North America.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Migdad, Muhammad, et al. 2012. *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*, CEWERS. Jakarta: Peace Through Development-BAPPENAS.
- Sen, Amartya. 2007. *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas* (penerjemah: Arif Susanto). Serpong: Marjin Kiri.
- Soerjono Soekanto. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, Djadjat. 2012. *Catatan Penutup: Lampung, Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*. Bandar Lampung: Aji Bandar Lampung.
- Sugiyono. 2001. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi R.I. tahun 2015.

Turner, H. 1981. *Social Stereotypes and Social Groups*, dalam J.C. Turner and H. Giles (eds.) *Inergroup Behaviour*. Oxford: Basil Blackwell.

Webel, Charles & Galtung, Johan. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York, Routledge.

Gedung Rektorat Universitas Lampung Lantai 3.

Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Agom Kecamatan Kalianda di Kantor Desa Agom pada tanggal 5 Oktober 2018.

Jurnal:

Kajian Perdamaian dan Kebijakan. 2014. "Peta Kekerasan Indonesia (September-Desember 2013) dan Konflik Antarkelompok di Indonesia", *The Habibie Center*, Edisi 06 Maret.

Setiawan, Wahyu. 2015. "Pasraman sebagai Media Pembentuk identitas Pasca Konflik", *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 4 (1).

Yayasan Denny JA dan LSI Community, "Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman", Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012.

Zainal, Suadi. 2016. "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21 (1).

Karya Ilmiah:

Tumengkol, Selvie M. 2012. "Teori Sosiologi Perspektif tentang Teori Konflik dalam Masyarakat Industri", Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Manado.

Wawancara dan Laporan:

Laporan Penelitian LPM Unkris, dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018.

Wawancara dengan Dr. Nina Yuda selaku Kepala Pusat Studi Kebudayaan Lampung Universitas Lampung pada tanggal 24 September 2018 di